

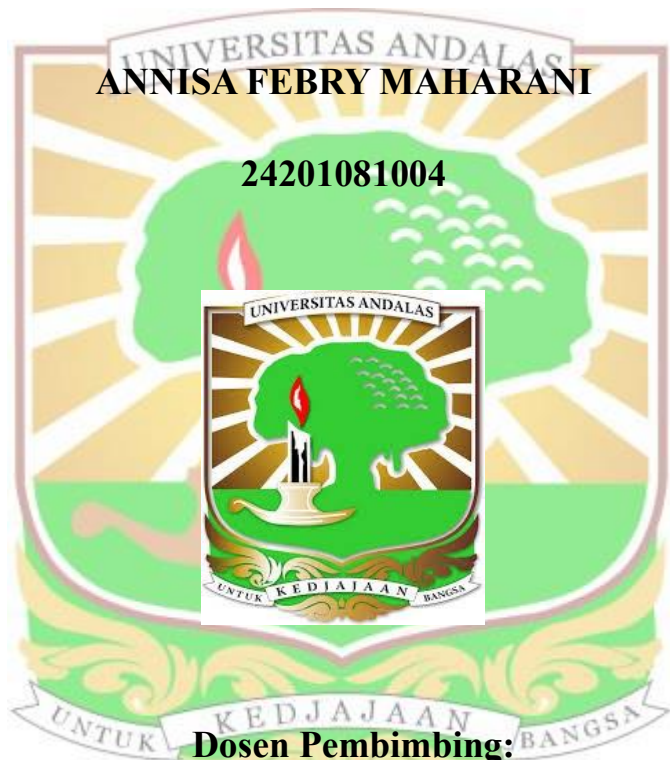
**KONTESTASI BIROKRAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN**

TESIS

Oleh

ANNISA FEBRY MAHARANI

24201081004



Dosen Pembimbing:

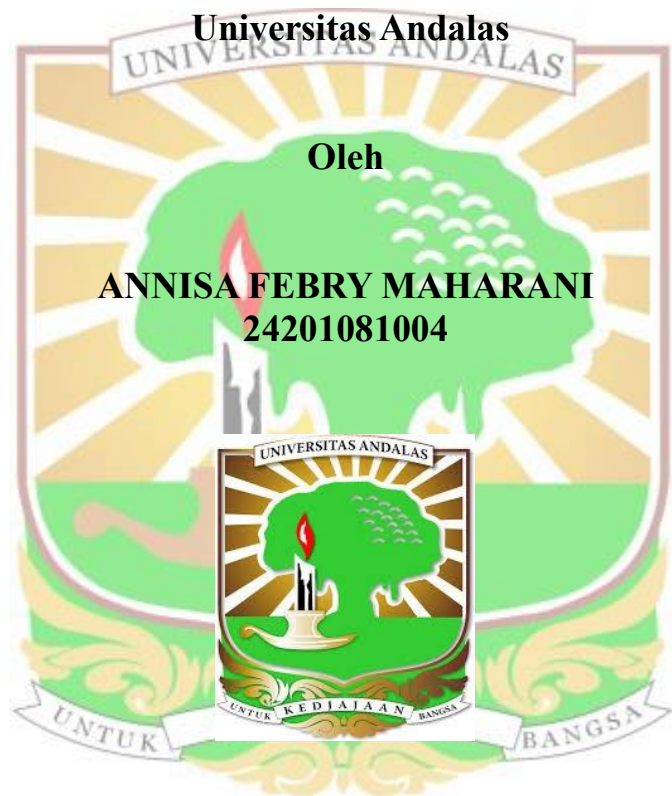
- 1. Dr. Bob Alfiandi, M.Si**
- 2. Prof. Dr. Afrizal, MA**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**KONTESTASI BIROKRAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN**

TESIS

**Tugas Untuk Mencapai Gelar Magister Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

ANNISA FEBRY MAHARANI, 24201081004. Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang, Judul Tesis: Kontestasi Birokrat dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Pembimbing I Dr. Bob Alfiandi, M.Si, Pembimbing II Prof. Dr. Afrizal, MA.

Tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di sektor pertanian, menjadi perhatian utama dalam era desentralisasi fiskal. Meskipun alokasi anggaran untuk sektor ini signifikan, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih rendah, yang mengindikasikan potensi inefisiensi dalam alokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya birokrat dalam mempertahankan rencana kerja dan anggaran belanja agar dapat masuk dalam APBD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dan pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam serta studi dokumen. Teori yang digunakan adalah teori pluralisme birokrasi dari Eva Etzioni-Halevy, yang dipadukan dengan teori pertukaran dari Peter M. Blau, yang melihat Pluralisme tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan teori pertukaran, karena tekanan dari beragam aktor tidak akan menghasilkan keputusan tanpa adanya mekanisme pertukaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menerapkan berbagai strategi dalam mengawal anggaran, termasuk komunikasi dan koordinasi dengan TAPD, Penguatan data untuk legitimasi teknis, serta pendekatan kepada DPRD untuk membangun dukungan politik. Proses ini tidak hanya berlangsung teknokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan negosiasi kepentingan antara eksekutif dan legislatif, yang menunjukkan adanya Tarik menarik kepentingan dalam kontestasi penyusunan APBD.

Kata Kunci: APBD, Kontestasi, OPD, Birokrat

ABSTRACT

ANNISA FEBRY MAHARANI, 24201081004. Master's Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Thesis Title: Bureaucratic Competition in the Preparation of Work Plans and Budgets for Food Crops, Horticulture, and Plantation Services. Advisor I: Dr. Bob Alfiandi, M.Si, Advisor II: Prof. Dr. Afrizal, MA.

The text highlights the challenges in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), particularly within the agricultural sector, during the era of fiscal decentralization. Despite significant budget allocations for this sector, its contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) remains low, which suggests a potential inefficiency in how the budget is allocated. The research described aims to identify the strategies bureaucrats use to ensure their work plans and budgets are included in the final APBD.

The study employed a qualitative, descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling, and data was collected through in-depth interviews and document analysis. The theoretical framework combined Eva Etzioni-Halevy's theory of bureaucratic pluralism with Peter M. Blau's exchange theory. This combination was used because pluralism alone is insufficient; it argues that pressure from various actors will not lead to a decision without an underlying exchange mechanism.

The research findings indicate that bureaucrats in the Department of Food Crops, Horticulture, and Plantations use several strategies to safeguard their budget proposals. These include communication and coordination with the Regional Government Budget Team (TAPD), leveraging strong data to provide technical legitimacy, and engaging with the Regional People's Representative Council (DPRD) to build political support. This process is not purely technical; it is heavily influenced by political dynamics and negotiations between the executive and legislative branches, revealing a struggle of competing interests during the APBD formulation.

Keywords: APBD, Contestation, OPD, Bureaucrats